

Pendidikan Multikultur



A Mosaic of Culture



BAB I Masyarakat Majemuk & Multikultural

Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.



MINISTRY OF
CULTURE AND TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA
www.indonesiatourism.go.id
www.my-indonesia.info



BAB 1

Masyarakat Majemuk & Multikultural

A. Hakekat Masyarakat Majemuk dan Masyarakat Multikultural

Berbagai kelompok sosial-budaya pada umumnya terikat oleh sebuah kepentingan bersama yang bersifat formal, yakni dalam bentuk sebuah Negara (Asyumardi, 2002). Dalam kosa kata sehari-hari, masyarakat multikultural ini lebih dikenal sebagai masyarakat majemuk. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial-budaya. Proses pembentuk masyarakat multikultur, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (1) kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau yang menimbulkan isolasi pada masyarakat. Isolasi geografis ini mengakibatkan penduduk berbeda etnis, kemudian mereka mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, (2) pengaruh kebudayaan asing yang menimbulkan terjadinya amalgamasi (kawin campur) dan asimilasi budaya yaitu kaum pendatang dengan pribumi yang membentuk kelompok sosial-budaya, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, dan (3) iklim yang berbeda antara daerah yang satu dan daerah lain sehingga menimbulkan kondisi alam yang berbeda dan akhirnya membentuk pola-pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda-beda pula antara masyarakat satu dengan lainnya.

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dicirikan oleh adanya keragaman budaya. Keragaman tersebut antara lain terlihat dari perbedaan bahasa, etnis, keyakinan agama dan budaya. Pada satu sisi, kemajemukan budaya ini merupakan kekayaan dan aset bangsa bangsa yang sangat berharga, namun pada sisi yang lain, pluralitas kultural tersebut memiliki potensi menjadi penyebab berbagai persoalan, termasuk konflik kultural dan disintegrasi atau perpecahan bangsa. Pluralitas kultural seringkali dijadikan alat untuk memicu munculnya konflik etnis, agama, ras dan antar golongan (SARA), meskipun sebenarnya faktor-faktor penyebab dari konflik dan pertentangan tersebut lebih pada

persoalan-persoalan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial dan politik (Raharjo, 2005). Secara demografis maupun sosiologis potensial bagi terjadinya konflik, karena masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural mereka. Konsep masyarakat multikultural sebenarnya relatif baru. Sekitar 1970-an, gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada. Kemudian diikuti Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lainnya (Suparlan, 2002). Kanada pada waktu itu didera konflik yang disebabkan masalah hubungan antar warga negara. Masalah itu meliputi hubungan antar etnis bangsa, agama, ras, dan aliran politik yang terjebak pada dominasi. Konflik itu diselesaikan dengan dimasyarakatkannya konsep masyarakat multikultural, yang esensinya adalah kesetaraan budaya, menghargai hak budaya komunitas dan demokrasi. Gagasan itu relatif efektif dan segera menyebar ke Australia dan Eropa, bahkan menjadi produk global. Bagi masyarakat Indonesia yang telah melewati reformasi, konsep masyarakat multikultural bukan hanya sebuah wacana, atau sesuatu yang dibayangkan. Tetapi, konsep ini adalah sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, konsep multikultural ini tidak henti-hentinya selalu dikomunikasikan di antara ahli sehingga ditemukan kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Bentuk komunikasi dalam rangka mempertajam pemahaman tentang multikulturalisme dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan diskusi, seminar, atau lokakarya. Kalau memungkinkan, sebaiknya para pemimpin, dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi (PT) duduk bersama membicarakan isu penting berkenaan dengan multikulturalisme dan cita-cita reformasi ini. Cita-cita reformasi pada pencapaian masyarakat yang berbinneka namun bersatu padu dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara. Bukan masyarakat yang seolah-olah hidup dalam ketidakpastian moral dan nilai-nilai dasar sebagaimana tercermin pada kondisi empirik masyarakat Indonesia yang masih diwarnai dengan berbagai permasalahan seperti tawuran antar pelajar, antar kampung, seks bebas, penggunaan obat-obat terlarang, pembalakan hutan, pencemaran air, udara

dan tanah, mafia peradilan, mafia pajak, korupsi, kolusi dan nepotisme serta konflik antar etnis, ras, agama dan antar golongan.

B. Karakteristik Masyarakat Majemuk dan Masyarakat Multikultur

Ciri masyarakat multikultural adalah (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok yang sering kali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain, misalnya keragaman etnis, (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer (tidak saling melengkapi). Dalam masyarakat multikultural, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya memiliki struktur sosial yang berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya, (3) kurang mengembangkan konsensus. Adanya latar belakang budaya yang berbeda sehingga dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat cenderung dengan cara *voting* (suara terbanyak) jarang dengan cara *consensus*, (4) relatif sering mengalami konflik. Kondisi ini disebabkan dalam masyarakat multikultural terdapat keragaman dalam berbagai aspek seperti, tradisi, agama, bahasa dan lainnya, (5) integrasi sosial tumbuh di atas paksaan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi, (5) pengaruh kondisi geografis menyebabkan adanya perbedaan tradisi antara masyarakat satu dengan lainnya. Sehingga proses integrasi atau penyatuan masyarakat dilakukan cenderung dengan cara paksaan, (6) adanya keterbatasan geografis juga menimbulkan ketergantungan ekonomi antarmasyarakat di daerah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan (7) terdapat dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Mahfud, (2010: 93) membedakan masyarakat multikultural menjadi beberapa macam sebagai berikut:

Pertama, multikulturalisme isolasionis yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain, *kedua*, multikulturalisme akomodatif yaitu masyarakat plural yang memilikikultur domain, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi kebutuhan kultural kaum minoritas, *ketiga*, multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesempatan kesetaraan dengan budaya dominan, *keempat* multikulturalisme kritikal/interaktif, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif disitegratif mereka, *kelima*, multikultural

kosmopolitan, yaitu paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada kebudayaan tertentu.

Terdapat dua struktur sosial masyarakat majemuk, yaitu: (1) struktur sosial yang terinterseksi, dan (2) struktur sosial yang terkonsolidasi (Raharjo, 2005). Pada struktur sosial yang terinteraksi masyarakat yang terdiri dari beragam etnis, ras, agama, bahasa dan budaya berbaaur dan saling tergantung satu sama lain, sehingga batas-batas etnis, ras, agama dan budaya tidak lagi kentara. Kelompok-kelompok sosial yang ada dapat menjadi wahana untuk berinteraksi dan melakukan aktivitas sosial, sehingga terbangun komunikasi yang kohesif antar anggota masyarakat. Struktur sosial kelompok yang saling berinteraksi pada akhirnya mampu membangun integrasi sosial dalam masyarakat multikultural. Sedangkan struktur sosial yang terkonsolidasi bilamana kelompok-kelompok sosial yang ada hanya menciptakan ruang interaksi dan komunikasi diantara orang-orang yang mempunyai latar belakang etnis, ras, agama, bahasa atau budaya yang sama. Bagi individu yang tidak memiliki latar belakang etnis, ras, agama, bahasa atau budaya yang sama pola komunikasi dan interaksi tidak terjadi secara intens, sehingga tidak terbangun integrasi sosial. Ruang strategis untuk membangun pola komunikasi dan interaksi antar etnis, ras, agama dan budaya terhalang oleh kelompok-kelompok yang bersifat eksklusif. Akibatnya akan muncul prasangka dan stereotip antar kelompok yang tak jarang berimplikasi pada pertentangan dan konflik.

Menurut Toomey (1999) identitas kultural merupakan perasaan (*emotional significance*) dari seseorang untuk ikut memiliki (*sense of belonging*) atau berafiliasi dengan kultur tertentu. Masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok itu kemudian melakukan identifikasi kultural, yaitu masing-masing orang mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Proses identifikasi ini yang akan akan menentukan individu-individu tersebut termasuk kedalam budaya tertentu. Pola pikir dan tata laku yang ditunjukkan juga akan sejalan dengan pola pikir dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompoknya yang tentu saja dapat menjadi pembeda dengan kelompok budaya lainnya. Dalam konteks identifikasi kultural ini, Suparlan (2002) menilai bahwa

isu tentang etnis dan etnisitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan realitas yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Para anggota kelompok etnis dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasana askriptif primordial etnisitas mereka. Akibatnya, perbedaan antara “siapa saya” dengan “siapa anda” atau “siapa kita” dengan “siapa mereka” terlihat dengan jelas batas-batasnya. Dalam situasi demikian, stereotip dan prasangka tumbuh dan berkembang dengan subur. Pada kehidupan masyarakat yang membagi diri kedalam kelompok-kelompok kultural serta menciptakan eksklusifitas diantara kelompok kultural akan menyulitkan terjadinya keterpaduan sosial diantara masyarakat. Hal ini disebabkan karena masing-masing kelompok saling menjaga identitas kelompoknya dengan tanpa memberikan ruang pada kelompok lain untuk memahaminya. Dengan demikian komunikasi tidak menjalin secara intens antar masing-masing kelompok, yang berimplikasi pada prasangka dan saling curiga antar kelompok. Antar kelompok saling menghindari komunikasi dan pergaulan secara mendalam, karena ada rasa takut ditinggalkan oleh kelompoknya. Padahal keterpaduan sosial dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama antar kelompok tanpa harus menghilangkan identitas kultural masing-masing kelompok. Menurut Raharjo (2005) akibat dari tidak adanya keterpaduan sosial ini, maka usaha untuk membentuk kehendak bersama (*common will*) sebagai suatu bangsa menjadi persoalan yang rumit dan membutuhkan waktu yang relatif panjang.

Pidato Presiden Soekarno dalam memperingati proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1954 mengingatkan pentingnya memahami kemajemukan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Ingat kita ini bukan dari satu adat istiadat. Ingat, kita ini bukan dari satu agama. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu, demikianlah tertulis di lambang negara kita, dan tekanan kataku sekarang ini kuletakkan kepada kata bhinna, yaitu berbeda-beda. Ingat kita ini bhinna, kita ini berbeda-beda (Kompas, 4 Maret 2001, hal. 31).

Suryadinata, (1992) menegaskan kembali apa yang dinyatakan oleh para pendiri republik ini. Bahwa keberadaan bangsa Indonesia tidak didasarkan pada bahasa ibu yang sama atau menciptakan satu kelompok etnis, kultur, atau religi. Apa yang

menyatukan orang Indonesia adalah karena penderitaan, penindasan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan secara bersama-sama. Dari kesamaan nasib tersebut muncul keinginan untuk bersama, walaupun berasal dari beragam bahasa, budaya, etnis, agama dan kepercayaan. Keberagaman inilah sebenarnya pondasi dan kekuatan bangsa Indonesia serta cikal bakal adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan bersama untuk membangun masyarakat yang satu dalam keberagaman dan beragam dalam kesatuan memerlukan adanya kesadaran bersama untuk mengakui perbedaan agama, ras, budaya, agama dan bahasa sebagai sebuah wahana untuk tetap saling memberi manfaat satu sama lain dan dapat eksis pada lingkungan yang sama. Ini adalah pondasi untuk bersatunya bangsa Indonesia. Karena hakekat multikulturalisme adalah adanya kemauan dan pengakuan yang sama terhadap semua etnis, ras, agama, bahasa dan budaya tanpa danya dikriminasi dan dominasi.

C. Lahirnya Konflik Kultural dan Gagasan Masyarakat Multikultural

Lemahnya komunikasi dan pemahaman antar kultural yang dipertajam ketimpangan kondisi sosial, ekonomi, politik berimplikasi pada konflik kultural yang tak berujung. Konflik SARA terutama pertikaian antar etnis telah terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Raharjo, (2005) menyajikan data tentang sebagian dari peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1994 sampai 2004. Pertikaian yang bernuansa SARA di Indonesia juga melibatkan warga etnis Cina, baik sebagai faktor pemicu (langsung) terjadinya kerusuhan ataupun sebagai imbas dari kerusuhan sosial yang diakibatkan oleh munculnya konflik politik, seperti misalnya “peristiwa Mei 1998” di Jakarta dan beberapa kota lain menjelang berakhirnya kekuasaan pemerintah Orde Baru.

Untuk menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural tentu tidak mudah. Paling tidak, dibutuhkan beberapa konsep yang mendukung demi terwujudnya tatanan multikultural yang betul-betul berpijak pada konsep yang kuat dan tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi lingkungan. Kondisi ini tidak terlepas dari proses kebijakan “monokultural” yang diterapkan semasa pemerintahan Orde Baru, yang berimplikasi pada prasangka dan tidak terciptanya

rasa saling terbuka antar etnis, ras, agama dan budaya. Hasil reformasi ini adalah, bahwa masyarakat Indonesia yang bercorak majemuk (*plural society*) yang berisikan potensi kekuatan primordial yang otoriter militeristik harus digeser menjadi ideologi keanekaragaman kebudayaan atau ideologi multikulturalisme. Dengan sendirinya, masyarakat majemuk (*plural society*) belum tentu dapat dinyatakan sebagai masyarakat multikultural (*multicultural society*), karena bisa saja di dalamnya terdapat hubungan antarkekuatan masyarakat varian budaya yang tidak simetris yang selalu hadir dalam bentuk dominasi, hegemoni dan kontestasi. Berkenaan dengan itu diperlukan tatanan baru masyarakat multikultural sebagaimana tujuan dan cita-cita Bhinneka tunggal ika. Untuk menciptakan tatanan baru masyarakat multikultural sebagaimana kondisi empirik masyarakat Indonesia diperlukan adanya keterbukaan dan saling pengertian dalam mengembangkan budaya etnis masing-masing, tanpa adanya prasangka dan saling curiga. Menurut Blum (2001: 19) kondisi ini menyangkut tiga aspek, yaitu: (1) menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang, (2) menghormati dan berkeinginan memahami tentang kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya, dan (3) menilai dan merasa senang dengan perbedaan budaya itu sendiri.

BAB 2

Konflik Etnis dan Konflik Agama

A. Pengertian Konflik

Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu "con" yang artinya bersama dan "fligere" yang artinya benturan atau bertabrakan (Setiadi, 2011). Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah (Rauf, 2011).

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Stoner dan Freeman (1952) membagi pandangan menjadi dua bagian, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang optimal, konflik harus dihilangkan. Konflik biasanya disebabkan oleh kesalahan manajer dalam merancang dan

memimpin organisasi. Dikarenakan kesalahan ini, manajer sebagai pihak manajemen bertugas meminimalisasikan konflik. Pandangan modern. Konflik tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain struktur organisasi, perbedaan tujuan, persepsi, nilai-nilai, dan sebagainya. Konflik dapat mengurangi kinerja organisasi dalam berbagai tingkatan. Jika terjadi konflik, manajer sebagai pihak manajemen bertugas mengelola konflik sehingga tercipta kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Coser (2001) dalam tulisannya yang berjudul *The Functions of Social Conflict*, ia mendefinisikan konflik sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka di mana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, melukai atau melumpuhkan pihak yang menjadi lawan. Coser (2001) juga berpendapat bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam membentuk, menyatukan, dan memelihara struktur sosial. Terjadinya konflik diantara satu kelompok dengan kelompok yang lain dapat memperkuat dan melindungi identitas kelompok sehingga tidak melebur dengan dunia sosial sekelilingnya. Tidak terjadinya konflik di dalam suatu kelompok menunjukkan integrasi kelompok yang lemah dengan masyarakat. Coser (2001) menganggap bahwa konflik tidak bisa hanya dipandang dalam pandangan negatif saja karena perbedaan adalah suatu hal yang normal yang sebenarnya berdampak pada memperkuat struktur sosial. Dengan begitu, Coser menolak pandangan bahwa tidak adanya konflik yang terjadi dalam suatu kelompok menjadi indikator kekuatan dan kestabilan dari suatu hubungan.

Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tapi bisa menjadi sumber pengalaman positif (Stewart & Logan, 1993). Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam memanajemen suatu kelompok atau organisasi. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tetapi juga memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan pihak – pihak yang terkait. Pelajaran itu dapat berupa bagaimana cara menghindari konflik yang sama supaya tidak terulang kembali pada masa yang akan datang dan bagaimana cara mengatasi konflik yang sama apabila sewaktu-waktu terjadi kembali.

Konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Hal ini dimaksudkan apabila kita ingin mengetahui konflik berarti kita harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi. Semua konflik mengandung komunikasi, tapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang buruk. Menurut Myers (1982). Jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, maka dalam proses itu, pasti ada konflik. Konflik pun tidak hanya diungkapkan secara verbal tapi juga diungkapkan secara nonverbal seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentangan (Stewart & Logan, 1993). Konflik tidak selalu diidentifikasi sebagai terjadinya saling baku hantam antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga diidentifikasi sebagai ‘perang dingin’ antara dua pihak karena tidak diekspresikan langsung melalui kata – kata yang mengandung amarah

B. Konflik Etnis

Dalam suatu keberagaman yang berkembang, keberadaan etnis tentunya menjadi salah satu aspek penting, dan menjadi yang tidak terpisahkan dari suatu keberagaman. Secara umum, Etnis atau suku dimaknai sebagai suatu kesatuan sosial yang dapat membedakan kesatuan berdasarkan persamaan asal-usul wilayah seseorang sehingga dapat diklasifikasikan sesuai dengan arti kelompok sosial yang serupa berdasarkan pada status kelompok maupun golongan. Etnis atau suku bangsa merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang berlainan berdasarkan identitas unsur kebudayaan yang mengakar kuat, terutama dengan bahasa yang merupakan salah satu aspek penting dalam budaya (Koentjaraningrat, 2007).

Perspektif lain memandang etnis merupakan sekumpulan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kolektif yang dipertegas dengan pemahaman akan kesatuan bangsa (Koentjaraningrat, 2007). Dalam hal ini keberadaan etnis ditentukan oleh pentingnya kesadaran kelompok, pemahaman yang luas akan kesatuan kebudayaan dan juga persamaan asal-usul yang melekat erat. Etnis merupakan sistem penggolongan manusia yang didasarkan pada sistem

kepercayaan yang diyakini, pengimplementasian nilai- nilai di masyarakat, pemahaman akan beragam kebiasaan, penguatan adat istiadat yang terkonstruksikan, penegasan norma- norma, penggunaan bahasa, penjelasan latar belakang sejarah manusia, wilayah geografis serta hubungan kekerabatan yang tak terpisahkan.

Didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa istilah etnis atau etnik memiliki makna sebagai suatu kelompok sosial masyarakat yang berada dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan yang menjadi pedoman. Kelompok sosial ini memiliki peran dan kedudukan tertentu berdasar pada faktor genetik, adat maupun tradisi, agama dan kepercayaan, sistem bahasa dan lain sebagainya. Etnis adalah serangkaian persamaan asal-usul yang merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong ketertautan dalam suatu ikatan. Jenis- jenis etnis yang tersebar di berbagai penjuru dunia antara lain sebagai berikut: Suku Bangsa Maya, Suku Bangsa Persia, Suku Bangsa Amazon, Suku Bangsa Aborigin, Suku Bangsa Han, Suku Gypsy, Suku Bangsa Yunani.

Di Indonesia sendiri keberagaman etnis dapat dicontohkan dengan adanya garis keturunan yang dianut suku tertentu, misal garis keturunan ayah yang terkenal dengan istilah Patrialinear yang dianut suku batak, garis keturunan ibu atau Matrialinear yang dianut suku sunda, serta adanya etnis atau suku bangsa campuran yang merupakan perpaduan dari dua ras yang berbeda yang kemudian memunculkan percampuran suku bangsa. Untuk memahami secara mendalam mengenai Etnis. Suatu kelompok etnis atau suku bangsa diklasifikasikan berdasarkan ikatan hubungan darah. Sehingga seseorang yang tergabung ke dalam kelompok etnis tertentu, mempunyai ikatan hubungan darah dengan kelompok etnis tersebut, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan termasuk dalam kelompok etnis jika tidak memiliki hubungan darah meskipun telah mengimplementasikan nilai-nilai kebudayaan dalam kelompok etnis tersebut (Koentjaraningrat, 2007).

Hal ini dapat diambil contoh dalam kehidupan, ketika orang Batak tidak berubah menjadi orang Jawa meskipun dirinya dalam keseharian berbaur dan berinteraksi secara terus menerus dengan orang Jawa. Tidak jarang, Etnis

seringkali dikaitkan dengan agama, namun agama bukanlah indikasi yang merujuk pada identitas etnis tertentu. Berdasarkan teori-teori di atas telah dijelaskan dan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa etnis atau suku bangsa merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat membedakan kesatuan berdasarkan kesamaan asal-usul seseorang sehingga dapat diklasifikasikan dalam status kelompok mana ia termasuk di dalamnya. Istilah etnis ini juga digunakan untuk mengacu pada satu kelompok, atau kriteria sosial yang perbedaannya terletak pada karakteristik kebudayaan yang melekat.

Sebenarnya konflik itu dapat terjadi di manapun kita berada, entah konflik antar suku, ideologi, atau bahkan antar agama. Setiap dari manusia memiliki potensi konflik masing-masing seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang. Semua ini tergantung pada kita, bagaimana kita menerima stimulus yang ada, merespon dari kekuatan stimulus yang timbul oleh suatu kejadian yang dapat menyebabkan perubahan potensi konflik menjadi sebuah konflik yang berbahaya. Patutnya kita dapat menganalisa dan memahami bagaimana penjelmaan tersebut dan kita dapat mencegah agar tak terjadi kesalahan yang sama. Manusia yang belajar adalah manusia yang tidak jatuh pada lubang yang sama.

Konflik dapat terjadi pada berbagai lapisan sosial, salah satunya adalah masyarakat. Konflik yang umum terjadi di masyarakat seringkali berupa konflik etnis ataupun agama. Dalam pembahasan ini, penulis membahas pengertian konflik etnis serta faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya konflik tersebut. Kemudian, penulis menjelaskan konflik yang pernah terjadi di masyarakat sebagai contoh konflik etnis yang terjadi di Indonesia.

Terkait dengan pengertiannya, konflik etnis dapat dipahami sebagai sebuah konflik yang melibatkan dua atau lebih kelompok etnis. Konflik etnis itu sendiri dapat disebabkan bukan hanya oleh karena perbedaan etnis, namun konflik etnis dapat terjadi berkat adanya dorongan dari beberapa faktor lain, seperti masalah politik, sosial, ekonomi atau teritorial. Dalam perkembangannya pada era kotemporer, istilah konflik etnis tidak hanya terkait dengan etnisitas. Bahkan, istilah ini juga dapat digunakan secara fleksibel untuk menggambarkan konflik yang tidak didasari atas etnisitas. Konflik etnis secara umum juga digunakan

untuk mendeskripsikan konflik internal yang memiliki skala luas, seperti konflik di Kamboja yang pada dasarnya bukan sebuah konflik etnis oleh karena konflik ini terjadi bukan karena permasalahan kelompok etnis namun lebih pada konflik antar kelompok politik (Brown et al, 1997). Dalam hal ini, terlihat bahwa konflik internal pada dasarnya dapat lebih dari sekedar konflik etnis. Digunakannya istilah konflik etnis secara fleksibel ini juga dikarenakan oleh istilah etnisitas itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut, konsep etnisitas tidak dapat dikatakan sebagai variabel bebas atau variabel penjelas yang berdiri sendiri untuk studi konflik internal kontemporer (Jacquin, 1998).

Konflik etnik merupakan salah satu jenis konflik yang tujuan dari salah satu pihak secara khusus didefinisikan dalam kerangka etnik, dan dimana kesalahan utama dari konfrontasi tersebut adalah perbedaan etnik. Apapun isu yang nyata ketika konflik terjadi, paling tidak, salah satu pihak yang bertikai akan menjelaskan kekecewaannya dalam istilah-istilah etnis, salah satu pihak yang bertikai akan mengklaim bahwa perbedaan identitas etnik adalah alasan kenapa anggota etnis tidak dapat menyadari keinginannya, mengapa mereka tidak memperoleh hak yang sama, atau mengapa klaim mereka tidak memuaskan (Stefan Wolf, 2006).

C. Konflik Agama

Sementara itu, definisi agama menurut Fox & Sandler mencakup lima dimensi berdasarkan pengaruhnya terhadap masyarakat dan politik. Pertama, agama adalah salah satu dasar atau basis bagi identitas. Dalam pengertian ini, agama bersama faktor lainnya seperti bahasa, sejarah bersama, kebangsaan, tempat tinggal, dan etnisitas membentuk identitas dari suatu masyarakat yang membedakannya dengan masyarakat lain. Kedua, agama mencakup sistem kepercayaan yang memengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Semakin besar kepercayaan agama terlibat (dalam berperilaku), semakin berkurang kemungkinan terjadinya kompromi dan akomodasi. Ketiga, doktrin agama atau teologi juga dapat memengaruhi perilaku. Doktrin agama ini dijadikan sebagai panduan dalam membuat keputusan. Keempat, agama menjadi sumber legitimasi

yang digunakan untuk menjustifikasi kebijakan dan tindakan yang dilakukan, sekalipun pihak lain menganggapnya tidak dapat dibenarkan, seperti tindakan bom bunuh diri. Kelima, agama diasosiasikan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang diterima oleh masyarakat dan dianggap memiliki otoritas dalam memberikan pendapat atas nama agama. Dengan demikian, mereka mempunyai dasar untuk dapat melakukan mobilisasi massa (Fox & Sandler 2005).

Adapun **konflik agama** (religious conflict) itu sendiri setidaknya dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. *Pertama*, konflik agama didefinisikan sebagai konflik di mana agama itu sendiri menjadi pusat ketidakcocokan (bersifat substansial). *Kedua*, konflik agama didefinisikan sebagai konflik di mana aktor-aktor yang terlibat menganut tradisi agama yang berbeda sehingga memiliki identitas yang berbeda pula (bersifat fungsional). Dalam tulisan ini, definisi kedualah yang digunakan dan dimaksudkan sebagai konflik agama (Lindberg 2008). Di Indonesia sendiri, pengertian kedua ini lebih sering diistilahkan sebagai konflik antarumat beragama (Matulesy 2013; Rahmi 2012; Zainuddin 2013).

Setidaknya terdapat tiga hipotesis yang menghubungkan faktor agama dengan konflik. *Pertama*, dalam pandangan sosio-psikologis, identitas keagamaan yang beragam membentuk identitas kelompok dan dapat menghasilkan eskalasi dinamika antarkelompok. Orang akan cenderung untuk mengistimewakan orang yang beragama sama karena dianggap sebagai satu kelompok dibanding orang lain yang identitas agama kelompoknya berbeda. Hal ini meningkatkan potensi eskalasi kekerasan terhadap orang dari kelompok agama lain (Basedau dkk. 2011).

Kedua, identitas keagamaan bersifat khusus karena terhubung dengan ide, norma, dan nilai bersama yang dilegitimasi oleh sumber transedental. Sifat transedental kemudian menciptakan klaim kebenaran mutlak/absolute yang tidak dapat diganggu gugat oleh manusia. Oleh karena itu, identitas berdasarkan norma dan nilai transedental tersebut sulit, bahkan tidak dapat dinegosiasikan/dikompromikan. Hal ini meningkatkan kecenderungan perilaku kekerasan oleh aktor agama terhadap mereka yang tidak percaya atau menganut tradisi agama yang berbeda. Melalui klaim sebagai yang paling benar, mereka

menganggap dirinya tidak bersalah ketika melakukan kekerasan atas nama agama, bahkan mereka termotivasi karena adanya pahala jika melakukan hal tersebut (Basedau dkk., 2011). Dengan kata lain, konflik agama biasanya dilihat sebagai permainan menang-kalah (zero sum game), di mana pihak yang kalah akan memulai lagi perkelahian begitu ia mendapatkan kesempatan (Lindberg 2008).

Ketiga, faktor agama sering dipahami sebagai sumber mobilisasi yang memungkinkan dalam konflik. Pemimpin (agama) dapat (dengan mudah) memolitisasi agama untuk memobilisasi pengikutnya guna melakukan aksi kolektif dan ikut terlibat dalam konflik. Padahal, konflik tersebut mungkin sebenarnya bukan tentang masalah agama, tetapi berakar pada masalah lain seperti politik dan sosio-ekonomi (Basedau dkk. 2011).

Tiga hipotesis dan hasil penelitian tersebut menjelaskan mengapa konflik yang melibatkan isu agama cenderung berlangsung lama dan sulit diselesaikan. Bahkan jika pun diselesaikan dengan kemenangan salah satu pihak, konflik berpotensi untuk terjadi begitu pihak yang kalah mendapatkan kesempatan. Padahal, konflik agama yang terjadi umumnya justru berakar pada masalah-masalah non-agama. Oleh karena itu, resolusi konflik yang seharusnya diterapkan setidaknya harus mencakup dua hal. Pertama, menyelesaikan masalah-masalah akar penyebab konflik yang sesungguhnya. Kedua, membangun kembali hubungan antarkelompok agama yang memburuk akibat politisasi isu agama tersebut.

D. Sebab-Sebab Konflik Etnis dan Konflik Agama

Tidak satupun manusia yang dapat hidup sendiri di dunia ini, satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan, memerlukan, melengkapi, dan memenuhi seputar kebutuhan hidupnya (zoon Politicon). Dengan adanya hal itulah mereka berkomunikasi sehingga terciptalah interaksi dan tanggapan perilaku seseorang, akan adanya interaksi-interaksi tersebut, karena konflik itu menurut Coser (2001) adalah perbedaan fokus dan pemahaman manusia. Faktor-faktor yang menjadi akar timbulnya konflik harus diangkat dengan benar-benar jelas sampai kepermukaan publik, sebab dengan cara ini kita bisa mencari solusinya. Etnik atau

suku bangsa, biasanya memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Sesuatu yang dianggap baik atau sakral dari suku tertentu mungkin tidak demikian halnya bagi suku lain. Perbedaan etnis tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis.

Konflik antar etnis ini terjadi karena benturan budaya, kepentingan, ekonomi politik, dan lain lain. Dan demi menciptakan Negara yang aman dan tentram, pemerintah harus menyelesaikan masalah konflik antar etnis. Cara yang lebih demokratik demi tercegahnya perpecahan, dan penindasan atas yang lemah oleh yang lebih kuat, adalah cara penyelesaian yang berangkat dari niat untuk *take a little and give a little*, didasari itikat baik untuk berkompromi dan bermusyawarah.

Faturochman (2003) menyebutkan setidaknya ada enam hal yang biasa melatarbelakangi terjadinya konflik etnis terjadi disebuah tempat. Enam hal tersebut antara lain yakni: 1. Kepentingan yang sama diantara beberapa pihak; 2. Perebutan sumber daya; 3. Sumber daya yang terbatas; 4. Kategori atau identitas yang berbeda; 5. Prasangka atau diskriminasi; 6. Ketidakjelasan aturan (ketidakadilan). Sementara itu, Sukamdi dan Browslee (2000) menyebutkan bahwa konflik antar etnik di Indonesia terdiri dari tiga sebab utama, yakni, konflik muncul karena ada benturan budaya; karena masalah ekonomi politik; dan karena kesenjangan ekonomi sehingga timbul kesenjangan social.

Di akses dari laman <https://www.oborkeadilan.com/2020/08/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html> (2 November 2020) Nurhazizah (2020) menyebutkan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan Individu

Perbedaan Individu ini bisa berupa perbedaan dalam perasaan, bisa juga dalam pendirian maupun perbedaan pendapat. Kita tahu bahwa setiap orang itu tidak sama, manusia itu makhluk yang unik dan istimewa tidak pernah ada persamaan yang baku antara individu dan lainnya. Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya Konflik sosial, karena ketika kita menjalani Interaksi sosial tidak mungkin seseorang itu selalu sejalan dengan yang lainnya. Seperti perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, pola fikir dan sebagainya.

2. Perbedaan Kebudayaan

Perbedaan kebudayaan ini dapat mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku individu dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Jadi kita tahu bahwa setiap kebudayaan mempunyai bermacam-macam kergaman adat, kebiasaan yang membedakan dengan kebudayaan yang lainnya. Dalam lingkungan kelompok masyarakat yang sama bisa terjadi konflik apalagi dengan kebudayaannya yang berbeda karena ukuran yang dipakai dalam satu kelompok atau satu masyarakat tidak akan sama dengan masyarakat yang lainnya.

3. Perbedaan Kepentingan

Konflik dapat terjadi karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Jadi perbedaan kepentingan ini juga merupakan faktor yang kuat yang menyebabkan terjadinya konflik. Karena setiap individu tidak sama dan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda pula ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, demikian pula dengan kelompok pasti ada kebutuhan yang tidak sama dengan kelompok lain.

4. Perubahan Nilai-nilai yang terlalu cepat

Perubahan nilai yang terlalu cepat dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru atau sistem nilai berlaku. Dan bentrokkn kepentingan ini juga dapat terjadi diberbagai bidang seperti dibidang ekonomi, bisa juga terjadi dibidang politik dan sebagainya. Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda dalam melihat dan mengerjakan sesuatu. Jadi perubahan ini dapat terjadi di berbagai aspek dan perubahan yang terjadi secara cepat ini akan membuat keguncangan dalam proses sosial di masyarakat bahkan dapat terjadi penolakan-penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah berlaku lama. Sebenarnya perubahan ini adalah sesuatu yang wajar terjadi, tetapi ketika perubahan ini terjadi secara

cepat maka dapat menyebabkan gejala sosial karena ketidak siapan masyarakat dan pada akhirnya akan menimbulkan konflik sosia

E. Manajemen Konflik Etnis dan Konflik Agama

Konflik antar etnis dan agama di Indonesia harus segera diselesaikan dan harus sudah ada solusi konkritnya. Dalam bukunya Wirawan (2020) menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik antar etnis dan konflik agama yang ada di sebuah Negara. Pertama, melalui Intervensi pihak ketiga. Dimana keputusan intervensi pihak ketiga nantinya final dan mengikat. Contoh adalah pengadilan. Kedua, Mediasi. Mediasi ini adalah cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga juga yang disebut sebagai mediator. Ketiga, Rokosialisasi. Proses penyelesaian konflik dengan transormasi sebelum konflik itu terjadi, dimana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai. Selain hal di atas Wirawan (2020) adapun cara lain dalam menyelesaikan konflik yang ada, yakni sebagai berikut:

1. Konflik Itu Harus di Management Menuju Rekonsiliasi

Konflik memang bukan sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Apa lagi konflik yang bernuansa karena perbedaan agama yang dianut dan perbedaan etnis. Konflik yang demikian itu memang suatu konflik yang sangat serius. Untuk meredam wajah bahaya dari konflik itu, maka konflik itu harus dimanagement agar ia berproses ke arah yang positif. Dr. Judo Poerwowidagdo, MA. Dosen Senior di Universitas Duta Wacana Yogyakarta menyatakan bahwa proses konflik menuju arah yang positif itu adalah sbb: Dari kondisi yang "Fight" harus diupayakan agar menuju Flight. Dari kondisi Flight diupayakan lagi agar dapat menciptakan kondisi yang Flaw. Dari Flaw inilah baru diarahkan menuju kondisi Agreement, terus ke Rekonsiliasi. Karena itu, masyarakat terutama para pemuka agama dan etnis haruslah dibekali ilmu Management Konflik setidaknya-tidaknya untuk tingkat dasar.

2. Merobah Sistem Pemahaman Agama

Konflik yang bernuansa agama bukanlah karena agama yang dianutnya itu mengajarkan untuk konflik. Karena cara umat memahami ajaran agamanyaalah yang menyebabkan mereka menjadi termotivasi untuk melakukan konflik.

Keluhuran ajaran agama masing-masing hendaknya tidak di retorikakan secara berlebihan. Retorika yang berlebihan dalam mengajarkan agama kepada umat masing-masing menyebabkan umat akan merasa dirinya lebih superior dari pemeluk agama lain. Arahkanlah pembinaan kehidupan beragama untuk menampilkan nilai-nilai universal dari ajaran agama yang dianut. Misalnya, semua agama mengajarkan umatnya untuk hidup sabar menghadapi proses kehidupan ini. Menjadi lebih tabah menghadapi berbagai AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) dalam menghadapi hidup ini. Rela berkorban demi kepentingan yang lebih mulia. Tidak mudah putus asa memperjuangkan sesuatu yang benar dan adil. Tidak mudah mabuk atau lupa diri kalau mencapai sukses. Orang yang sukses seperti menjadi kaya, pintar, menjadi penguasa, cantik, cakep, memiliki suatu power, merasa diri bangsawan. Semuanya itu dapat menyebabkan orang menjadi mabuk kalau kurang waspada membawa diri. Hal-hal yang seperti itulah yang sesungguhnya lebih dipentingkan oleh masyarakat bangsa kita dewasa ini.

3. Mengurangi Penampilan Berhura-Hura dalam Kehidupan Beragama.

Kegiatan beragama seperti perayaan hari raya agama, umat hendaknya mengurangi bentuk perayaan dengan penampilan yang berhura hura. Hal ini sangat mudah juga memancing konflik. Karena umat lain juga dapat terpancing untuk menunjukkan existensi dirinya bahwa ia juga menganut agama yang sangat hebat dan luhur.

4. Redam Nafsu Distinksi Untuk Menghindari Konflik Etnis.

Setiap manusia memiliki nafsu atau dorongan hidup dari dalam dirinya. Salah satu nafsu itu ada yang disebut nafsu Distinksi. Nafsu Distinksi ini mendorong seseorang untuk menjadi lebih dari yang lainnya. Kalau nafsu ini dikelola dengan baik justru akan membawa manusia menjadi siap hidup bersaing. Tidak ada kemajuan tanpa persaingan. Namun, persaingan itu adalah persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat itu adalah persaingan yang berdasarkan norma-norma Agama, norma Hukum dan norma-norma kemanusiaan yang lainnya. Namun, sering nafsu Distinksi ini menjadi dasar untuk mendorong suatu etnis bahwa mereka adalah memiliki berbagai kelebihan dari etnis yang lainnya. Nafsu Distinksi ini sering membuat orang buta akan berbagai kekurangannya. Hal inilah

banyak orang menjadi bersikap sombong dan exclusive karena merasa memiliki kelebihan etnisnya.

Pemecahan masalah terkait konflik juga dapat di minimalisir dari faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik etnis seperti, kepentingan yang sama diantara beberapa pihak, perebutan sumber daya, sumber daya yang terbatas, kategori atau identitas yang berbeda, prasangka atau diskriminasi harus diselesaikan secara demokratik. Cara cara seperti rekonsialisasi dan mediasi harus dikedepankan. Penyelesaian konflik tanpa kekerasan inilah yang harus dilakukan, agar tidak jatuh banyak korban.

Daftar Pustaka

- Arends, R. (1997). *Learning to teach*. Singapore: Mc Graw-Hill book Company.
- Asyar'i, L. (2004). *Membebaskan Diri dari Keterikatan Lokal*. Kompas, Tanggal 3 September 2004.
- Asyumardi, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
-, (2002). *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alwasilah, C. (2008). *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ahmadi, K dan Amri, S. (2011). *Mengembangkan Pembelajaran IPS Terpadu*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Abdul Wahid (2000). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama, 2004, hlm. 22.
- Banks, J. A. & Ambrose A. C. Jr. (1995). *Teaching Strategies for the Social Studies*. NY: Longman, Inc.
-, (2005). "Multicultural Education: Its Effects on Studies' Racial and Gender Role Attitude" In *Handbook of Research on Social Teaching and Learning*. New York.: MacMillan.
- BSNP. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: BSNP.
- Basedau, M., Strüver, G., Vüllers, J. & Wegenast, T. (2011). "Do Religious Factors Impact Armed Conflict? Empirical Evidence from Sub-Saharan Africa". *Terrorism and Political Violence*, 752–779.
- Brown, Michael et al. 1997. *Nationalism and Ethnic Conflict, An International Security Reader*. Cambridge: MIT Press.
- Bennett, C. & Spalding, E. (1992). "Teaching the Social Studies: Multiple Approaches for Multiple Perspectives". In *Theory and Research in Social Education*. XX:3(263-292).
- Byrnes, D. (1988). "Children and Prejudice". *Social Education*. 52 (267-271).
- Budimansyah, D. dan S. Syam (ed). (2006). *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan (Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri)*. Bandung: Lab. PKn FPIPS UPI.
- Blum A. (2001). *Antirasisme, Multikulturalisme dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, dalam Lerry May dan Shari Colins Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*, Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bruce, Steve. 2000. *Fundamentalisme. Pertautan Sikap Keberagaman dan Modernitas*. Jakarta, Erlangga.
- Capra, F. (2007). *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*. M Thoyibi (Penerjemah). Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya.

- Coser, Lewis A., 1913-2003. (2001). *The functions of social conflict*. London: Routledge. ISBN 978-1-135-63908-2.
- Dantes, Dkk. (2008). *Pengembangan Perangkat Evaluasi Proses dan Hasil Belajar IPS dan PKn (Laporan Penelitian)* Singaraja: IKIP Negeri Singaraja.
- Deny, S. (2008). *Integritas dalam Proses Pembentukan Identitas Bangsa Untuk Menumbuhkan Budaya Kewarganegaraan (Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh dan Mahasiswa Etnis Tionghoa di Kota Medan Mengenai Pembangunan Masyarakat Multikultural) (Disertasi)*. Bandung: UPI.
- Farisi, I, (2005). *Rekonstruksi Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan IPS-SD Berdasarkan Perspektif Konstruktivisme. (Disertasi)*: Bandung: UPI.
- Faturochman (2003). *Konflik: Ketidak-adilan dan Identitas*. Yogyakarta: PPSK UGM.
- Fox, J. & Sandler, S. (2005). "The Question of Religion and World Politics". *Terrorism and Political Violence* 17 (3), 293–303.
- Hasan, H. (1996). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Depdikbud.
-, (2005). *Pembaharuan Pendidikan IPS di Era Otonomi Pendidikan. (Makalah)*. Disajikan dalam seminar sehari Fakultas PIPS IKIP Negeri Singaraja. Singaraja: FPIPS IKIP Negeri Singaraja.
- Jannes, E. (2001). *Konflik Antar Etnis, Ujian Bagi Budaya Lokal*. Kompas, 21 Maret 2001.
- Jackson, P. (1994). *Handbook of Research on Curriculum*. New York: McMillan Publishing Company.
- Jarolimex, J. and Walter P. (1993). *Social Studies in Elementary Education (9th.Ed)*. New York: McMillan Publishing Company.
- Jacquin, Dominique. 1998. "Ethnic War and International Intervention" dalam *Journal of International Studies*. South Kingstown: Millenium.
- Joyce, B., & Weil, M. (2009). *Model of teaching*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Kertih, W. (1998). *Impelementasi Model Pembelajaran Klarifikasi Nilai di Sekolah Dasar. (Tesis)*. Bandung: IKIP Bandung.
-, W. (2005). *Analisis Kurikulum IPS dan PPKn Sekolah Dasar. (Laporan Penelitian)*. Singaraja: Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja.
- Koentjaraningrat. 2007. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Karen, Amstrong (2009). *The Case for God: What Religion Really Means*" diterjemahkan menjadi *Masa Depan Tuhan : Sanggahan terhadap Fundmanetalisme dan Ateisme*, Bandung: penerbit Mizan, thn.2009.hlm.19-20.
- Lasmawan, W. (2003, 2005). *Pengembangan Model Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Sosial Budaya (Studi Pengembangan Pembelajaran IPS pada Sekolah Dasar di Bali). (Laporan Penelitian)*. Singaraja: STKIP Singaraja.
-, (2002). *Pengembangan Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Dengan Model Sains-Teknologi-Masyarakat (STM). (Disertasi)*. Bandung: UPI.
-, (2010). *Menelisik Pendidikan IPS dalam Perspektif Kontekstual-Empirik*. Singaraja: Mediakom Indonesia Press Bali.

-, (2009). Mengembangkan Pembelajaran IPS Berbasis Sosial Budaya dengan Model Konstruktivis (*Laporan Penelitian*). Singaraja: Undiksa
- Lindberg, Jo-Eystein (2008). Running on Faith? A Quantitative Analysis of the Effect of Religious Cleavages on the Intensity and Duration of Internal Conflicts. Tesis. University of Oslo.
- Mahfud, C. (2010). *Pendidikan Multikultur*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Muchtar, S. (2008). *Strategi Pembelajaran Pendidikan IPS*. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.
- Matulesy, Andik. (2013?). Menggalang Toleransi Guna Mereduksi Konflik Antar Umat Beragama. Diakses pada 15 April 2015 dari <http://andikmatulesy.untag-sby.ac.id/tulisan/karya-ilmiah/90-menggalangtoleransi-guna-mereduksi-konflik-antarumat-beragama>
- Muladi. (2002). Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Habibie Center. 2002, hlm. 25.
- National Council for the Social Studies. (1994). *Conecting Science, Technology and Education of Citizen*. Washington D.C.: NCSS.
-, (2000). *National Standards for Social Studies Teachers*, Volume 1. Washington, DC: National Council for the Social Studies.
-, (2001). *Guidelines for Teaching About Science/Technology/Society in Social Studies: Education for Citizenship in the 21st Century*: <http://www.uow.edu.au/sts/ncss/pubs/00nvt.html>.
- Nagel, P. (2008). *Cooperative Learning And The Elementary Social Studies Classroomfalse*. *Journal Education*, 128. 3 (Spring, 2008): 363-368.
- Rahardjo, T. (2005). *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antar Etnis* (Editor: Mu'amma Ramadhan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rose, C. And Nicholl. (2003). *Accelerated Learning for the 21st Century*. Bandung: Nuansa.
- Revell, N. (2010). Religious education, conflict and diversity: an exploration of young children's perceptions of Islam. *Educational Studies*. Dorchester-on-Thames: May 2010. Vol. 36, Iss. 2; pg. 207.
- Rauf, Maswadi (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: DIKTI.
- R. Garaudy (1993). *Islam Fundametalis dan Fundamentalisme Lainnya*. Bandung: Pustaka.
- Savage, T. & Armstrong, D. (1996). *Effective Teaching in Elementary Social Studies*. Ohio: Prentice Hall.
- Suparno, P. (1996) *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius
- Suryadinata, L. (2002). "Indonesian State Policy toward Ethnic Chinese: From Assimilation to Multiculturalism?", dalam Simposium Internasional III Jurnal Antropologi Indonesia. Bali: Universitas Udayana
- Soemantri. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: Rosdakarya.
- Sukadi. (2006). Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana (Studi Etnografi tentang Pengaruh

- Masyarakat terhadap Program Pendidikan IPS pada SMU Negeri 1 Ubud, Bali). (*Disertasi*). Bandung: UPI.
-, (2010). Pengembangan Model Pembelajaran PKn Berbasis *Yadnya*. (*Laporan Penelitian*) Singaraja: Undiksha
- Suparlan, P. (2002). Masyarakat Majemuk dan Perawatannya. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Nomor 63. Tahun XXIV, September – Desember, 2002.
-, (1999). Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme. *Jurnal Studi Amerika*. Volume 5.
- Sadulloh. (2003). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bumi Siliwangi: Alfabeta
- Slavin, R. (2005). *Cooperative Learning: Theory, Research and Practice*. London: Allyn and Bacon.
- Setiadi, Elly M. (2011). Pengantar sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi dan pemecahannya. Kencana.
- Swellengrebel, L. (1960). *Bali, Some General Information. Dalam Bali: Studies in life, Thought and Ritual*. The Hague: W. Van Hoeve.
- Schement, J. R. (2002). *Encyclopedia of Communication and Information* (Volume 1). New York: McMilland Reference.
- Stoner, James A. F, at all (1952). *Management (edisi ke-6th ed., Annotated instructor's ed.* Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. ISBN 0-13-108747-9.
- Sukamdi, Abdul Haris dan Brownslee, Patrick (2000) *Migrasi Buruh di Indonesia, Politik dan Praktis*. Yogyakarta: Population Studies Centre Gadjah Mada University.
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grassindo.
- Titib, M. (1995). Nilai-nilai Budaya Bali; Implementasinya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. (*Makalah*). Denpasar: Universitas Udayana
- Toomey, T. (1999). *Communicating Across Culture*. New York: The Guilford Publications.
- Triyanto. (2007). *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Paul E & Don K. (2012). *Strategi dan Model Pembelajaran: Mengajarkan Konten dan Keterampilan Berpikir*. Jakarta: Indeks
- Poedjiadi, A. (2007). *Sains Teknologi Masyarakat: Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
- Wirawan (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Winataputra, U. (2001). Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS). (*Disertasi*). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zamroni, (2011). *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

Zainuddin. (2013). “Solusi Mencegah Konflik Antarumat Beragama”. Diakses pada 15 April 2015 dari <http://zainuddin.lecturer.uinmalang.ac.id/2013/11/11/solusi-mencegahkonflik-antarumat-beragama/>